

Judul : Dapat harga BBM Rp 15 ribu, beban nelayan jadi berkurang
Tanggal : Jumat, 17 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dapat Harga BBM Rp 15 Ribu Beban Nelayan Jadi Berkurang

SENAYAN menyambut baik intruksi Presiden Prabowo Subianto memberi harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 15 ribu per liter bagi pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT). Kebijakan tersebut sebagai bentuk nyata keprihatinan Pemerintah terhadap masyarakat pesisir dan sektor perikanan nasional.

Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya mengatakan, harga khusus tersebut mampu meringankan beban operasional nelayan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha perikanan. Kebijakan tersebut menjadi bukti Pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dan berupaya memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi nelayan.

"Alhamdulillah, kebijakan BBM khusus nelayan yang berukuran 30 sampai 200 GT ini sesuai dengan aspirasi yang disampaikan nelayan di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng)," ujar Danang di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Diketahui, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM bersubsidi seharga Rp 6.800 per liter. Sedangkan nelayan dengan kapal berukuran 30 hingga 200 GT memperoleh BBM seharga Rp 15 ribu per liter. Sebelumnya, mereka harus membeli BBM non-subsidi dengan harga mencapai Rp 21.300 per liter. Sehingga memberatkan aktivitas melaut dan mengurangi keuntungan para pelaku usaha perikanan.

Saat ini, harga rata-rata produksi solar dalam negeri sekitar Rp 18.600 per liter. Selisih

sekitar Rp 3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danang melanjutkan, dengan harga BBM yang lebih terjangkau, biaya operasional kapal diharapkan menurun sehingga pendapatan nelayan dapat meningkat. Karena itu, implementasi kebijakan ini diharapkan tepat sasaran dan diikuti dengan pengawasan yang baik.

"Supaya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan yang berhak menerimanya," imbuh politisi Gerindra ini.

Selisih harga tersebut, kata Danang, sangat memengaruhi biaya operasional dan daya saing sektor perikanan nasional. "Semoga realisasi kebijakan ini, memberikan kepastian usaha, meningkatkan produktivitas penangkapan ikan, dan memperkuat perekonomian masyarakat pesisir," harap legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Anggota Komisi IV DPR Hindun Anisah menambahkan, kebijakan ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha perikanan, khususnya pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 GT. Penurunan harga BBM tersebut merupakan langkah yang tepat di tengah tingginya biaya operasional sektor perikanan.

"Kebijakan ini sangat membantu meringankan beban biaya operasional nelayan sehingga mereka dapat kembali melaut dengan lebih tenang dan produktif," ujar Hindun di Jakarta, Selasa (14/7/2026). ■ TIF